

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang yang telah melakukan pengembangan di berbagai sektor. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia dapat bertahan dalam era globalisasi. Dengan semakin meningkatkan pengembangan, berarti meningkatkan pula kegiatan usaha baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi swasta lainnya. Salah satu pengembangan yang dilakukan adalah kegiatan bisnis mulai dari usaha kecil hingga usaha besar, dari perusahaan jasa hingga perusahaan manufaktur. Perkembangan tersebut memberikan dampak yang sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan bahkan untuk ekonomi internasional. Selain itu, terdapat dampak negatif yang dihadapi pemerintah maupun organisasi swasta lainnya seiring berkembangnya kegiatan bisnis yaitu risiko terjadinya kecurangan yang semakin tinggi.

Kecurangan (*fraud*) hingga saat ini menjadi suatu hal yang fenomenal yang tidak dapat dipungkiri. *Fraud* hampir terjadi di seluruh sektor pemerintahan dan sektor swasta. Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pun tidak luput dari kecurangan. *Fraud* dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan

tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. (Karyono, 2013:4-5)

Setiap tindak kriminal, selalu di dorong atau dipicu oleh suatu kondisi dan perilaku penyebab terjadinya. Begitu pula dengan *fraud*, dalam teori segitiga *fraud* (*fraud triangle theory*) perilaku kecurangan didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*perceived opportunity*) dan pembenaran (*rationalization*). (Tuanakotta, 2010:207)

Perilaku *fraud* oleh pelakunya bermula dari suatu tekanan (*pressure*) yang menghimpit hidupnya (berupa kebutuhan akan uang), padahal ia tidak bisa berbagi (*sharing*) dengan orang lain. Setidaknya-tidaknnya, itulah yang dirasakannya. Konsep ini dalam bahasa Inggris disebut *perceived non-shareable financial need*. Konsep ini menciptakan motif bagi terjadinya kejahatan. Akan tetapi, pelaku kejahatan harus mempunyai persepsi bahwa ada peluang baginya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui orang lain. Persepsi ini, *perceived opportunity*, merupakan sudut kedua dari *fraudtriangle*. Sudut ketiga adalah *rationalization* (rasionalisasi) atau mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Mencari pembenaran sebenarnya merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. (Tuanakotta, 2010:207-212)

Menurut *Examination Manual 2006* dari *Association of Certified Fraud Examiner*, Kecurangan terdiri atas empat kelompok besar yaitu kecurangan

laporan (*Fraudulent Statement*), penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*), Korupsi (*Corruption*) dan kecurangan yang berkaitan dengan komputer. (Karyono, 2013:17)

Di Indonesia, kasus kecurangan semakin marak terjadi akhir-akhir ini. Salah satu bentuk kecurangan yang paling dikenal oleh masyarakat adalah korupsi. Korupsi sudah seperti sebuah penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan menjalar ke seluruh bagian. Kasus korupsi terjadi di berbagai perusahaan baik perusahaan kecil hingga perusahaan besar. Kasus korupsi juga telah melibatkan pejabat publik, penyelenggara negara, pegawai sipil bahkan para penegak hukum.

Korupsi secara umum dapat didefinisikan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2001, korupsi dapat didefinisikan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan indeks yang dilansir dari laman Gallup, Indonesia bertengger di puncak daftar negara terkorup di Asia Tenggara. Dalam korupsi ruang lingkup bisnis, tingkat korupsi Indonesia berada pada persentase 86%, sedangkan negara-negara Asia Tenggara tercatat 72%. Adapun tingkat korupsi di lingkup pemerintahan, Indonesia berada pada persentase 91%, lebih besar dari

negara Asia Tenggara yang mencapai 66%. (www.tempo.co/Selasa, 10-03-2015/Pukul 09:42)

Indonesia Corruption Watch (ICW) meliris ribuan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di periode 2014. Koordinator Divisi Investigasi dan Publikasi ICW, Tama S Langkun, mengatakan semester pertama 2014, terdapat 308 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 659 orang. Sedangkan kerugian negara sebesar Rp 3,7 triliun. Sedangkan semester kedua, terdapat 321 kasus korupsi dengan 669 orang tersangka, serta kerugian negara sebesar Rp 1,59 triliun. “Total tahun 2014, jumlah kasus 629 kasus, jumlah tersangka 1328 orang dan kerugian negara sebesar Rp 5,29 triliun,” ujarnya. (hukumonline.com/Senin, 16-03-2015/Pukul 19:39)

Penanganan masalah korupsi di Indonesia kembali menjadi sorotan. Saat ini upaya pemberantasan korupsi telah menunjukkan perkembangannya. Hal ini dibuktikan selain dengan terbentuknya lembaga independen yang berperan untuk mengawasi dan menyelidiki keadaan keuangan pemerintahan maupun organisasi swasta yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemerintah juga membentuk suatu lembaga khusus untuk memberantas korupsi yaitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terdapat beberapa kasus korupsi yang merugikan negara yang masih dalam proses penyelidikan, seperti :

1. Kasus korupsi dana penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. KPK menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka karena diduga menyelewengkan akomodasi haji dengan total anggaran Rp 1 triliun. Awalnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencium adanya penyimpangan dalam perjalanan haji. Ketua PPATK, Muhammad Yusuf menyebutkan bahwa sepanjang 2004-2012 ada dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 80 triliun dengan bunga sekitar Rp 2,3 triliun. Hasil audit PPATK, ada transaksi mencurigakan sebesar Rp 230 miliar yang tidak jelas penggunaannya. Ada indikasi dana haji ditempatkan di suatu bank tanpa ada standarisasi penempatan yang jelas. ([www.tribunnews.com/Selasa, 10-03-2015/Pukul 09:45](http://www.tribunnews.com/Selasa,10-03-2015/Pukul09:45))
2. Skandal Bailout Bank Century. BPK menemukan adanya indikasi praktik operasi perbankan di Bank Century yang tidak sehat dan merugikan bank dan berpotensi merugikan negara, yaitu pemberian kredit L/C fiktif Rp 397,97 miliar pihak terkait dan pemberian L/C fiktif sebesar US\$ 75,5 juta. (Hutasuhut:2013)
3. Kasus korupsi pengadaan alat Portable Data Terminal (PDT) di BUMN PT Pos Indonesia terjadi tahun 2012/2013. Proyek tersebut diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 10,5 miliar. Kasus ini menjerat Dirut PT Pos Indonesia Budi Setiawan selaku tersangka. Selain Budi, kasus pengadaan sebanyak 1.725 unit alat PDT ini juga telah menetapkan

beberapa tersangka lainnya. (www.detik.com/ Senin, 16-03-2015/Pukul 09:55)

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan empat penyimpangan dalam pengadaan simulator uji klinik pengemudi roda dua (R2) dan roda empat (R4) tahun anggaran 2011 di korlantas Polri. Akibatnya, negara dirugikan Rp 121 miliar. BPK meneemukan berbagai penyimpangan yang dikelompokkan dalam empat hal, dimulai sejak proses penganggaran hingga pembayaran. BPK menemukan, dilibatkannya PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) dan PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI), dua perusahaan yang menjadi kontraktor proyek simulator pada tahapan penganggaran. Dua perusahaan itu dipastikan jadi pemenang sebelum proses tender dimulai. Bahkan data-data yang digunakan dalam proses penganggaran adalah data-data dari pihak PT CMMA dan PT ITI sehingga terjadi konflik kepentingan. (metrotvnews.com/Senin, 16-03-2015/Pukul 09:40)

Dalam melakukan pengusutan tindak pidana dapat dilakukan dengan berbagai cara investigasi. Tetapi dalam kasus tindak pidana korupsi sulit untuk menentukan pelakunya. Oleh karena itu, dalam pengusutan tindak pidana di luar bidang hukum pengadilan dapat dibantu oleh seseorang yang ahli dalam bidang ekonomi. Ahli ekonomi yang dapat membantu adalah seorang auditor. Auditor dianggap sebagai orang yang ahli dibidang keuangan dan akuntansi. Auditor dapat memberikan bantuannya berkenaan dengan korupsi dan kecurangan melalui audit investigasi.

Audit investigasi merupakan suatu bentuk audit atau pemeriksaan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur dan teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan (Wahono:2011). Tujuan audit investigasi adalah untuk membuktikan bahwa kecurangan benar-benar terjadi, kapan dan di mana terjadinya, apa penyebabnya, siapa pelakunya, siapa yang dirugikan dan berapa kerugiannya, cara melakukan atau modus operasinya dan bukti-bukti yang diperoleh sebagai pendukung pembuktian. (Wind:2014)

Audit investigasi berhubungan dengan pengujian analisis forensik dalam pengumpulan bukti dengan menggunakan prosedur dan teknik investigasi serta teknik audit yang kemudian akan digunakan dalam perkara pengadilan. Pada audit investigasi prosedur dan teknik yang digunakan relatif berbeda dengan prosedur dan teknik yang digunakan di dalam audit keuangan (Karyono,2013:127)

Di dalam menjalankan audit invetigasi perlu didukung oleh kemampuan auditor, sikap kompetensi, independensi, dan profesionalisme. Auditor perlu menggunakan keahliannya untuk mengumpulkan bukti-bukti audit pada kasus kecurangan yang banyak terjadi. Untuk itu diperlukan kemampuan, pengetahuan dan ketepatan dalam proses pengungkapan kecurangan (Rahmayani:2014). Di dalam SPAP dinyatakan bahwa sikap umum seorang auditor yang berhubungan dengan pribadinya adalah kompetensi (keahlian dan pelatihan teknis), independensi dan profesionalisme (penggunaan kemahiran profesional auditor dengan cermat dan seksama). Menurut (Fitriani:2010) agar tujuan audit

investigasi dapat tercapai secara efektif, auditor mempunyai beberapa tanggung jawab umum yang harus dipenuhi, diantaranya audit investigasi dilaksanakan oleh para petugas yang secara bersama-sama mempunyai keahlian yang diperlukan. Auditor harus memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya kecurangan yang terjadi dan sebelumnya telah diindikasikan oleh berbagai pihak.

Dalam pelaksanaan audit diperlukan auditor yang profesional dan kompeten. Profesionalisme itu sendiri diisyaratkan dengan tiga hal utama yang harus dimiliki oleh anggota profesi yaitu, berkeahlian/berkemampuan, berpengetahuan dan berkarakter. Dalam hal berkeahlian, auditor harus memiliki keahlian khusus selain yang telah dimiliki oleh *financial auditor*. Keahlian yang harus dimiliki merupakan perpaduan dua keahlian yaitu keahlian sebagai *financial auditor* dan investigator. (Widayanti:2001)

Auditor investigasi tidak cukup hanya memiliki kemampuan ataupun keahlian tetapi harus memiliki sikap skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional adalah “*a choice to fulfill the profesional auditor’s duty to prevent or reduce or harmful consequences of another person’s behavior*” (Shaub dan Laurence, 1996 dalam Ida Suraida, 2005). Dari definisi di atas dapat dimaknai bahwa skeptisisme profesional auditor merupakan suatu sikap yang kritis terhadap bukti audit dalam bentuk keraguan, pertanyaan atau ketidaksetujuan dengan pernyataan klien.

Skeptisisme profesional dapat dilatih oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit dan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung atau

membuktikan asersi manajemen. Seorang auditor seharusnya tidak hanya mengikuti prosedur audit yang tertera dalam program audit, tetapi juga harus disertai dengan sikap skeptisisme profesional. Standar profesional akuntan publik mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai sikap auditor yang mencakup pemikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (IAI:2004). Standar auditing tersebut mensyaratkan agar auditor memiliki sikap skeptisisme profesional dalam mengevaluasi dan mengumpulkan bukti audit terutama yang terkait dengan pengungkapan kecurangan.

Efektivitas pelaksanaan audit investigasi dapat tercapai apabila auditor memenuhi tanggung jawab umum sesuai dengan standar pelaksanaannya. Auditor harus memiliki keahlian dan kemampuan yang diperlukan serta sikap skeptisisme profesional yang tinggi.

Dapat dilihat pada kasus yang terjadi di Bank Century. Komisioner Indonesia Corruption Watch, Yanuar Rizky, menilai audit BPK atas kasus Century itu sangat lemah karena proses audit investigasi tidak dilakukan dengan semestinya. Yanuar menilai BPK seperti tidak memiliki skema dalam mengaudit. Misalnya, dana talangan dari BI (Bank Indonesia) yang masuk ke Century sebelum Century di bailout menyebar ke mana saja tidak diketahui. Artinya, BPK juga harus memeriksa rekening seluruh pejabat BI yang terkait dengan pemberian FPJP ini. (IRIB Indonesia, 2011)

Selain itu, BPK berperan untuk memastikan dan memverifikasi bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsipnya secara relevan dan reliabel. Namun Laporan Hasil Audit Investigasi Lanjutan Atas Kasus Bank Century Tbk. Nomor 87A/LHP/X V/12/2011 tanggal 22 Desember 2011 membawa banyak kekecewaan dan tidak menghasilkan temuan baru, karena diindikasikan dalam proses auditnya dilakukan oleh auditor yang tak berkualifikasi sedangkan pekerjaan audit sendiri harus dilakukan oleh tim profesional dan kenyataan BPK menugaskan auditor dengan kualifikasi biasa dan tidak mempunyai kualifikasi sebagai Auditor Forensik. (Siti Hamida:2011)

Dari kasus tersebut terlihat bahwa audit investigasi yang dilakukan BPK tidak berjalan secara efektif karena tidak menghasilkan temuan baru. Hal ini dikarenakan auditor yang menanganinya tidak memiliki kemampuan dalam melakukan audit investigasi. Padahal jenis audit yang dilakukan adalah audit investigasi, karenanya pemeriksaan aliran dana tersebut membutuhkan auditor dengan keahlian dan kemampuan dibidang khusus dengan sertifikasi CFE atau *Certificate Fraud Examiners*. (okezone.com/Senin, 06-04-2015/Pukul 17:45)

Selain itu, hal ini mengindikasikan bahwa auditor BPK tidak menerapkan sikap skeptisisme profesional dalam melakukan audit investigasi. BPK sebagai lembaga pemeriksa Keuangan Negara seharusnya mempunyai kewajiban mendeteksi dan mengungkapkan setiap kemungkinan kecurangan (*fraud*) yang terjadi dalam operasional seluruh kementerian, lembaga dan pemerintahan pusat maupun daerah. Karena yang dilakukan oleh BPK adalah bersifat *detective control*, seharusnya BPK sebagai auditor yang andal mempunyai keahlian dan

kemampuan serta sikap skeptisisme profesional yang tinggi dalam proses auditnya.

Di sisi lain dalam audit investigasi, seorang auditor memulai suatu audit dengan praduga/indikasi akan adanya kemungkinan kecurangan dan kejahatan yang akan diidentifikasi dan diungkap melalui audit yang akan dilaksanakan. Kondisi tersebut misalnya, akan mempengaruhi siapa yang akan diwawancarai terlebih dahulu atau dokumen apa yang harus dikumpulkan terlebih dahulu. Selain itu, dalam audit investigasi jika memiliki kewenangan, auditor dapat menggunakan prosedur dan teknik yang umumnya digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kejahatan, seperti pengintaian dan penggeledahan (Wahono:2011).

Teknik audit adalah cara-cara yang ditempuh auditor untuk memperoleh pembuktian dalam membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Teknik audit erat hubungannya dengan prosedur audit, dimana teknik-teknik audit digunakan dalam suatu prosedur audit untuk mencapai tujuan audit. Menurut (Tuanakota,2010:350) terdapat 7 teknik audit dalam audit investigasi : 1. Memeriksa fisik, 2. Meminta konfirmasi, 3. Memeriksa dokumen, 4. Review analitikal, 5. Meminta informasi, 6. Menghitung kembali, 7. Mengamati. Dalam audit investigasi teknik-teknik audit bersifat eksploratif, mencari “wilayah garapan”, atau review analitikal, maupun pendalaman penyelidikan.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang pernah dilakukan oleh Laras Rahmayani (2014) yang berjudul *Pengaruh Kemampuan Auditor, Skeptisisme Profesional Auditor, Teknik Audit dan Whistleblower Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan Kecurangan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan auditor, sikap skeptisisme profesional auditor, teknik audit dan *whistleblower* berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada (1) obyek penelitian yaitu BPKP yang ada di provinsi Banten (2) pengurangan variabel *whistleblower*. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa *whistleblower* merupakan pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari auditor investigasi.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan serta dari penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Pengaruh Kemampuan Auditor, Skeptisisme Profesional Auditor dan Teknik Audit Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan Kecurangan (survey pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam

penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana kemampuan auditor yang bekerja di Perwakilan BPKP Provinsi Banten.
2. Bagaimana skeptisisme profesional auditor yang bekerja di Perwakilan BPKP Provinsi Banten.
3. Bagaimana teknik audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten.
4. Bagaimana efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten.
5. Seberapa besar pengaruh kemampuan auditor, skeptisisme profesional auditor dan teknik audit terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari tujuan penelitian adalah mengumpulkan data, mengolah dan kemudian ditarik kesimpulan, guna memberikan gambaran tentang Pengaruh Kemampuan Auditor, Skeptisisme Profesional Auditor dan Teknik Audit Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan Kecurangan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kemampuan auditor yang bekerja di Perwakilan BPKP Provinsi Banten.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui skeptisisme profesional auditor yang bekerja di Perwakilan BPKP Provinsi Banten.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui teknik audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui kemampuan auditor, skeptisisme profesional auditor dan teknik audit terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten baik secara parsial maupun secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang auditing.

2. Bagi para peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam penelitian berikutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Penulis

Penelitian ini akan menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan penulis mengenai pengaruh kemampuan auditor, skeptisisme profesional auditor dan teknik audit terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan.

2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

- a. Memberikan informasi bagi responden (auditor) yang terlibat mengenai pentingnya kemampuan dan sikap skeptisisme profesional auditor serta teknik audit yang digunakan dalam audit investigasi.
- b. Memberikan masukan untuk peningkatan kemampuan auditor dalam melaksanakan tugasnya sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan optimal.

3. Lembaga Pendidikan

Memberikan masukan bagi dunia akademik khususnya jurusan akuntansi dalam mendidik mahasiswa untuk mengetahui kemampuan dan sikap skeptisisme yang harus dimiliki auditor serta teknik-teknik audit investigasi dalam melakukan audit investigasi.